

KABUPATEN MOROWALI – PROFIL KERENTANAN BENCANA ALAM

Profil ini merupakan penjelasan singkat mengenai kerentanan lingkungan Alam, Bangunan, Sosial, dan Ekonomi Kabupaten Morowali terhadap bahaya atau terjadinya bencana alam. Inisiatif Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan oleh pemerintah lokal juga dijelaskan dalam profil ini.

2016

Morowali mempunyai banyak desa pesisir yang rawan akan banjir dari bagian hulu Daerah Aliran Sungai dan dari laut.



LINGKUNGAN ALAM

Kabupaten Morowali terletak di Provinsi Sulawesi Tengah di bagian tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia. Kabupaten Morowali terdiri atas sembilan kecamatan dengan ibu kota Bungku yang meliputi empat kecamatan. Dengan luas area 5.472 km², kabupaten ini terdiri dari dataran pantai, daerah aliran sungai kecil, teras pantai yang ditinggikan, dan juga area perbukitan hingga pegunungan. Kabupaten Morowali juga memiliki sejumlah pulau pulau kecil yang terletak di Laut Banda di sebelah tenggara daratan utama.

Bahaya dan Risiko

Terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki resiko bencana (BNPB 2013).

Kerentanan Lingkungan Alam

Kondisi topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerahpesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

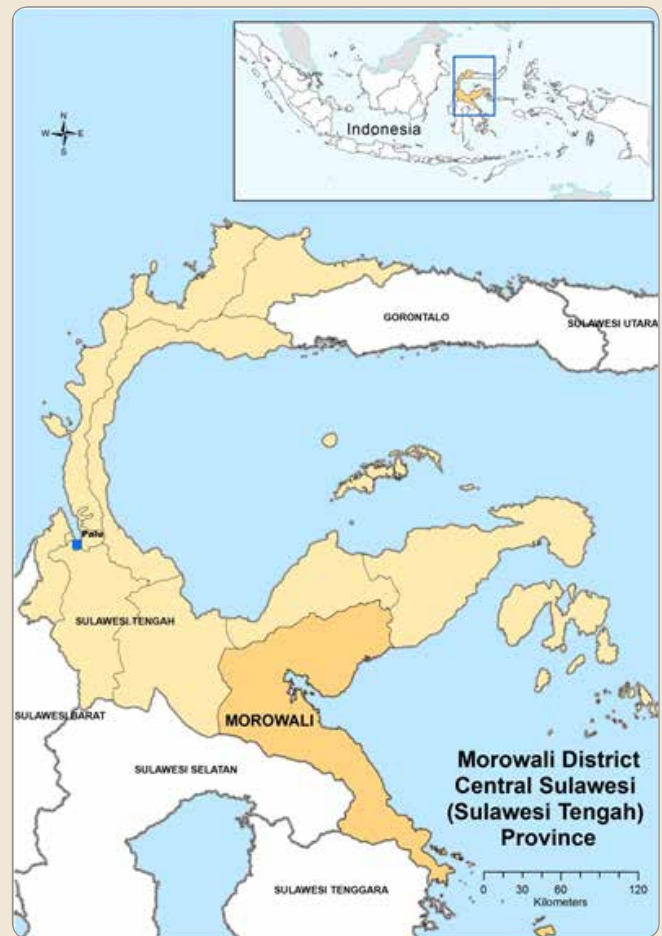


Table 1. Penilaian risiko potensi bahaya untuk Kabupaten Morowali (Indeks Risiko Bencana - 2013).

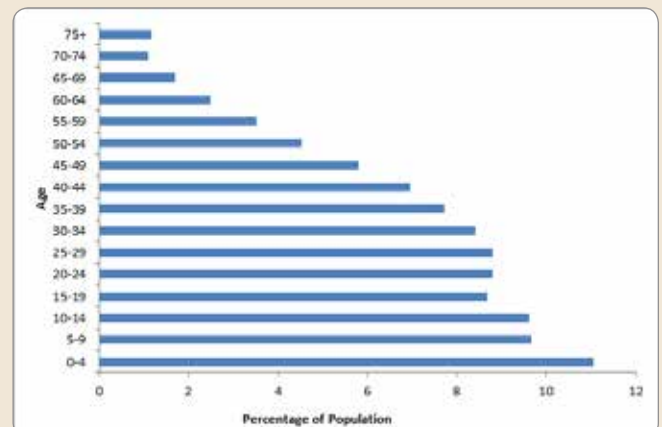
Potensi Bahaya	Gempa	Tsunami	Banjir	Tanah Longsor	Abrasi Pantai	Kebakaran Hutan	Cuaca Ekstrem	Kekeringan
Risiko	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

LINGKUNGAN SOSIAL

Populasi Kabupaten Morowali pada tahun 2014 sebanyak 111.002 orang. Sebagian besar wilayah di kabupaten ini merupakan daerah pedesaan yang berselang-seling, kepadatan penduduk relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak daerah lain di Indonesia. Populasi sebagian besar penduduk Morowali adalah Muslim.

Populasi Penduduk Usia Muda

Kabupaten Morowali memiliki populasi penduduk usia muda karena lebih dari 50 persen penduduk Kabupaten Morowali berusia lebih muda dari 30 tahun. Penduduk muda dapat lebih rentan terhadap bencana, meskipun demikian pada usia ini mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan mengenai bahaya dan risiko melalui sekolah. Selain itu, media sosial adalah model pendidikan yang bagus untuk anak-anak dan pemuda.



Sumber : Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2015.

LINGKUNGAN EKONOMI

Kerentanan Ekonomi

Ekonomi Morowali ini sangat bergantung pada ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, komoditas ekspor utama adalah kelapa sawit, bijih nikel, dan minyak mentah. Sektor-sektor ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak berada di Kabupaten Morowali, atau dalam beberapa kasus, tidak berada di Indonesia. Perubahan permintaan global atau harga yang signifikan dari komoditas-komoditas tersebut bisa berdampak pada perekonomian Morowali secara signifikan. Selain itu, bencana alam seperti aliran debris, banjir, dan sedimentasi dapat merusak infrastruktur yang merupakan tumpuan bagi sektor-sektor ini.

Pengelolaan Daerah Tangkapan Air

Kegundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari bisa memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai.

LINGKUNGAN BANGUNAN

Konstruksi dan Pengendalian Pembangunan yang Buruk

Pembangunan dan bangunan di Kabupaten Morowali sebagian besar belum memiliki izin dan juga seringkali tidak mematuhi perencanaan tata ruang dan peraturan pembangunan yang sudah ditetapkan. Kondisi topografi dan tanah, sering tidak dipertimbangkan sebelum pembangunan. Hal ini mengakibatkan banyak bangunan berisiko runtuh saat terjadi gempa, karena adanya likuifaksi atau banjir. Banyak rumah juga terletak di dataran pesisir atau dekat saluran sungai dan sebagai hasilnya, berisiko terkena banjir dan erosi.

Infrastruktur yang Rentan

Jalan, jembatan, rumah ibadah, sekolah, dan rumah-rumah belum tentu dibangun untuk dapat bertahan ketika ada bencana banjir dan gempa bumi. Jalan dan jembatan rentan terhadap erosi, longsor, dan arus debris. Hal tersebut perlu menjadikan perhatian ekstra karena adanya keterbatasan akses jalan menuju Kabupaten Morowali, sehingga ketika terjadi bencana dan menutu akses jalan, tidak ada rute alternatif untuk penyaluran bantuan atau sumber daya.

KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Anggaran Manajemen Bencana sebagian besar dialokasikan dari anggaran nasional dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Sejak 2011, anggaran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) telah dianggarkan untuk Morowali dengan perkiraan untuk tahun 2016 sebesar 38,380 milyar Rupiah (2.877.604 dolar). Anggaran 2016 harus digunakan dengan hati-hati karena tidak sebanding dengan daerah kabupaten StIRRRD yang lainnya dan mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan respon-cepat banjir dalam beberapa tahun terakhir

Koordinasi

Meskipun ada struktur untuk memfasilitasi kegiatan PRB melalui regulasi dan pembentukan BPBD; pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi PRB di Kabupaten Morowali perlu perbaikan. Dalam diskusi telah teridentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dan pengetahuan tentang kegiatan PRB masih kurang, sehingga masyarakat menjadi lebih bergantung pada pemerintah.

Ada kerjasama antara instansi pemerintah dan LSM, tetapi ada peluang bagi LSM untuk lebih efektif digunakan dalam kegiatan pelatihan dan simulasi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam inisiatif PRB masih perlu ditingkatkan.

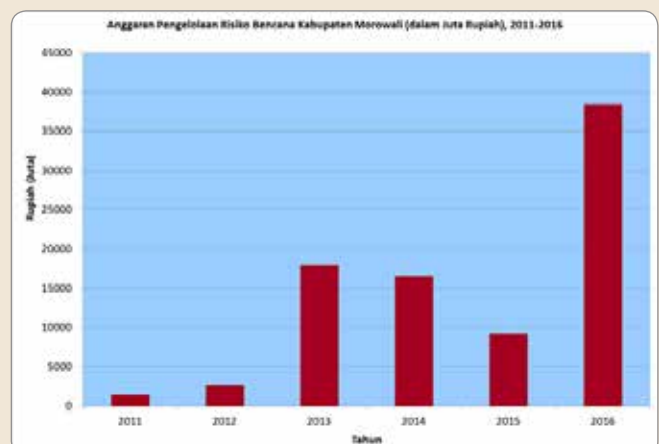
Tanggung Jawab PRB

Instansi pemerintah selain BPBD, sektor swasta, dan masyarakat di Morowali belum memahami dengan baik bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, kegiatan PRB tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak terintegrasi di seluruh kelompok dan lembaga ini. Para pemangku kepentingan biasanya memiliki pandangan bahwa manajemen risiko bencana adalah tanggung jawab pemerintah, terutama BPBD.

Skor kinerja untuk setiap kategori PRB Morowali, Februari 2016



Hasil Survey Penilaian Diri Pemerintah Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Diri Pemerintah Daerah (LG-SAT) yang memberikan gambaran ringkas mengenai kelebihan dan kelemahan kondisi PRB di Kabupaten Morowali, Februari 2016.



Sumber : BPBD Morowali, 2016.

TENTANG StIRRRD

PENGUATAN KETAHANAN INDONESIA MELALUI PENGURANGAN RISIKO BENCANA



Kegiatan ini kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan GNS Science didukung oleh Program Bantuan New Zealand, untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari bencana alam melalui peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana oleh pemerintah lokal dan universitas lokal. Program ini meliputi sepuluh kabupaten/kota dan melibatkan universitas local untuk memahami isu tentang pengurangan risiko bencana di daerahnya, membantu kemampuannya dalam memahami dan mengelola isu tersebut, kemudian menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana dan implementasinya di lapangan.

Salah satu kunci utama disini adalah meningkatkan kerjasama antara insititusi (SKPD) di pemerintah daerah, universitas lokal dan pihak swasta dimana akan membangun pendidikan dan program penelitian dalam aspek pengelolaan bencana untuk membantu masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah terlibat secara aktif baik dalam perencanaan maupun implementasinya dan saling mendukung serta berbagi pengalaman dari seluruh daerah yang termasuk dalam program ini. Kegiatan ini didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, BAPENAS dan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber:

BNPB, 2013. Indeks Rawan Bencana Indonesia.

BPS 2015. Kabupaten Morowali Dalam Angka 2014.

Catatan dari Workshop Kunjungan Awal StIRRRD (7 Agustus 2015).

Catatan dari Workshop Penyusunan Rencana Aksi StIRRRD (17 Februari 2016).

INFORMASI LEBIH LANJUT:

<http://StIRRRD.org> atau

HUBUNGI:



Michele Daly

Risk and Society Department
GNS Science
Wellington, New Zealand
m.daly@gns.cri.nz



Dr. Teuku Faisal Fathani

Department of Civil and
Environmental Engineering
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
tfathani@ugm.ac.id



Richard Woods

Risk & Society Department
GNS Science
Wellington, New Zealand
r.woods@gns.cri.nz



Dr Agung Setianto

Geological Engineering
Department
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
agung_setianto@ugm.ac.id



NEW ZEALAND
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & TRADE
Aid Programme

